



**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL**

Gedung B Kantor Beperta Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130
Telepon : 021 6341710 (Hanting), Fax : 021 6341667, Website : <http://korpri.or.id>, e-mail : tubkoid_korpri@yahoo.com

Jakarta, 13 Januari 2017

Nomor : SE- 01 /KU/1/2017

Lampiran : —

Perihal : **Program Gampang Umroh Bareng KORPRI**

Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga
2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

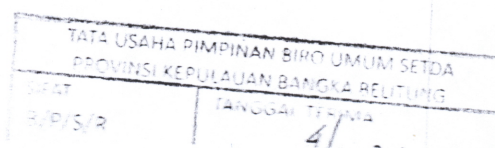
di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan program Pembinaan Kerohanian, peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta memenuhi aspirasi anggota KORPRI, bersama ini disampaikan dengan hormat Program Gampang Umroh Bareng KORPRI sebagai berikut :

1. Nama Program adalah Gampang Umroh Bareng KORPRI.
2. Peserta Umroh adalah anggota KORPRI (PNS) dan keluarganya (orang tua, anak, mertua) serta Pensiunan PNS.
3. Keuntungan Program Gampang Umroh :
 - a. Syarat Mudah;
 - b. Harga relatif murah;



- c. Pelayanan dan fasilitas nyaman sesuai paket yang diambil;
 - d. Tersedia cicilan hingga 60 bulan;
 - e. Insya Allah pasti berangkat.
4. Persyaratan Pendaftaran Umroh meliputi :
- a. Passport yang masih berlaku 6 (enam) bulan, dengan nama yang tercantum di pasport paling sedikit 3 suku kata (Peraturan Arab Saudi), contoh ;
MUHAMMAD ISMAIL ABDURRAHMAN
 - b. Fotocopy e-KTP 3 (tiga) lembar.
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah Asli (bagi suami-istri).
 - d. Fotocopy Akte Lahir (asli bagi anak-anak).
 - e. Pas foto terbaru berwarna latar belakang putih, tampak wajah 80%, ukuran 4 x 6 (10 Lembar).
 - f. Wanita di atas 45 tahun harus melampirkan e-KTP asli.
 - g. Melampirkan surat izin cuti dari Pejabat berwenang.
5. Program Umroh terdiri dari 2 paket:
- a. Paket Ekonomi dengan harga program USD 1.750;
 - b. Paket Eksekutif dengan harga program USD 2.500.

Harga sudah termasuk :

- 1) Tiket Pesawat Udara (PP) Ekonomi Class JKT-MAD-JED-JKT.
- 2) Perlengkapan umroh, Airport Tax, Handling (Rp. 1.000.000,-)
- 3) Akomodasi Sesuai Program
- 4) Makan 3 (tiga) kali sehari masakan Indonesia
- 5) Transport Bus AC
- 6) VISA
- 7) Ziarah seputar Mekkah dan Madinah
- 8) Muthawif/Guide + Air Zam-zam 5 Liter
- 9) Bimbingan manasik dan buku manasik umroh
- 10) Bagasi cuma-cuma untuk 20 kg/sesuai ketentuan penerbangan.

Harga tidak termasuk :

- 1) Pembuatan passport dan surat-surat lain yang dibutuhkan.
- 2) Surat Keterangan Mahram (suami-istri) Rp. 250.000,-

- 3) Tour acara tambahan di luar program
- 4) Kelebihan bagasi/Overweight
- 5) Extra bill (Laundry, Telephone, Room Service, dll)
- 6) Vaksin Meningitis/Kartu Kuning Kesehatan
- 7) Biaya-biaya lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah (baik RI maupun Saudi)
- 8) Biaya Visa 2.000 Real untuk yang sudah umroh 1 tahun kebelakang. Paket di atas merupakan paket di luar ramadhan. Untuk pelaksanaan pada bulan ramadhan dilaksanakan additional Paket disesuaikan dengan harga pasar.

6. Pembatalan Umroh

Pembatalan umroh diberlakukan apabila administrasi calon jamaah umroh sudah diproses kepastian jadwal keberangkatannya dengan dikenai denda :

- a. Empat puluh lima (45) hari sebelum jadwal keberangkatan umroh dikenakan potongan 25% dari harga paket.
- b. Empat puluh empat (44) hari sampai dengan 30 hari sebelum jadwal keberangkatan Umroh dikenakan potongan sebesar 50% dari harga paket.
- c. Empat belas (14) hari sebelum jadwal keberangkatan umroh dikenakan potongan sebesar 75 % dari harga paket.
- d. Kurang dari empat belas (14) hari sebelum jadwal keberangkatan umroh maka uang keberangkatan tidak dapat dikembalikan.

7. Persyaratan Dokumen Pembiayaan meliputi :

- a. Copy KTP Pemohon;
- b. Copy KK;
- c. Copy NPWP;
- d. Surat Nikah;
- e. Slip Gaji;
- f. Copy Rekening Gaji 3 bulan terakhir.

8. Persyaratan Nasabah & Ketentuan Pembiayaan

- a. Sudah diangkat sebagai PNS
- b. PNS Payroll di Bank atau kerjasama potong gaji

- c. DP : 0%
 - d. Plafon maksimal pembiayaan yang ditanggung bank sebesar Rp 50.000.000,,-. Plafon pembiayaan di atas Rp 50.000.000,- disyaratkan jaminan tambahan (fixed asset, logam mulia, cash collateral, dll)
 - e. Jaminan pembiayaan (minimal 2 dari dokumen) sebagai berikut:
 - 1) Ijazah asli terakhir
 - 2) SK Pengangkatan
 - 3) Buku Nikah Asli
 - 4) Kartu TASPEN
 - f. Jangka waktu pengembalian maksimal 5 (lima) tahun
 - g. Usia PNS pada saat jatuh tempo pembiayaan tidak melebihi usia MPP (Masa Persiapan Pensiun/1 tahun sebelum pensiun)
 - h. Bagi keluarga PNS yang akan umroh pembiayaannya ditanggung PNS yang bersangkutan
 - i. Surat pernyataan bendahara gaji yang berisikan keterangan bersedia memotong gaji sampai dengan pembiayaan berakhir dan bersedia menginformasikan kepada Bank Syariah pemberi pembiayaan apabila pegawai dimutasi dan membantu pengurusan potong gaji di bendahara yang baru.
 - j. Surat pernyataan tidak mengalihkan rekening gaji dan menyatakan kesediaan melapor ke bank syariah pemberi pembiayaan, apabila pegawai dimutasikan di unit kerja lain.
9. Program Gampang Umroh Bareng KORPRI dapat dilihat di website: www.gampangumroh.id

Program Gampang Umroh Bareng KORPRI dibangun atas prinsip kebersamaan dan kemanfaatan.

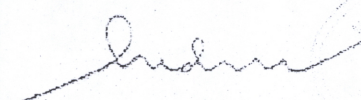
Program-program dimaksud agar disebarluaskan kepada setiap anggota KORPRI melalui Instansi SKPD-cagian masing-masing di setiap tingkat kepengurusan KORPRI.

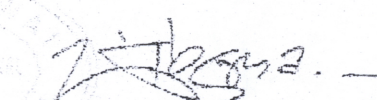
Demikian untuk untuk menjadikan periksa dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH


Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI selaku Penasehat Nasional KORPRI;
2. Wakil Presiden RI selaku Wakil Penasehat Nasional KORPRI;
3. Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
4. Menteri Dalam Negeri selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
5. Menteri Negara BUMN selaku Penasehat Nasional Harian KORPRI;
6. Para Kepala Lembaga Tinggi Negara selaku Penasehat Pengurus KORPRI Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu selaku Penasehat Pengurus KORPRI Kementerian;
8. Para Pimpinan Lembaga selaku Penasehat Pengurus KORPRI Lembaga;
9. Panglima TNI selaku Pembina Pengurus KORPRI TNI;
10. Kapolri selaku Pembina Pengurus KORPRI Polri;
11. Para Direksi BUMN selaku Penasehat Pengurus KORPRI BUMN;
12. Para Gubernur selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
13. Para Direksi BUMD selaku Penasehat Pengurus KORPRI BUMD;
14. Para Bupati selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
15. Para Walikota selaku Penasehat Dewan Pengurus KORPRI Kota.